



POLITIK ISLAM DI INDONESIA: IDEOLOGI PARTAI MASYUMI MASA ORDE LAMA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MASA REFORMASI

Trei Ilham Supawi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses Islamic politics in Indonesia through the Masyumi Party during the Old Order and the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) during the Reformation Era. Writing this article using descriptive analysis and historical research methods. The historical method is divided into four steps, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that Masyumi was an Islamic party which became a unifying pillar of the nation during the Old Order. Masyumi's struggle in upholding Islamic law as the state ideology did not run smoothly after the changes that occurred in the seven words and the Jakarta Charter. Unlike the case with the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), which was founded during the Reformation period by the Nahdlatul Ulama (NU) mass organization. PKB aims to convey the aspirations of the people, especially NU members who want freedom in expressing opinions on issues in the government. PKB has a political basis based on Pancasila, not Islam. Despite carrying different goals, these two parties continue to run the parliamentary line because of the struggle for Islamic politics in Indonesia.

ARTICLE HISTORY

Received 12/01/2023
Revised 16/01/2023
Accepted 24/02/2023
Published 25/02/2023

KEYWORDS

Political Islam; Masyumi; PKB; Reformation era.

CITATION (APA 6th Edition)

Supawi, T.I. (2023). Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 64-72.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ ilhamsupawi17@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6499>

PENDAHULUAN

Penelusuran terhadap hubungan Islam dalam perpolitikan di Indonesia sudah muncul dari zaman ke zaman, berbagai isu bermunculan yang menjadikan topik ini menarik untuk dikaji hingga saat ini (Putra, 2019). Sentuhan Islam dalam dunia politik di Indonesia sebelumnya telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menandakan adanya suatu pemahaman yang utuh tentang kelengkapan doktrin Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Islam dan politik merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat atau tidak dapat dipisahkan, di mana Islam membutuhkan adanya politik (negara) untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, seperti pada aspek moralitas. Oleh karena itu, politik bisa dijadikan salah satu bidang amal bagi umat Islam selain bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa politik bagi umat Islam harus diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam (Prihatin, 2016).

Jika melihat sejarah yang ada, Indonesia telah mengalami masa penjajahan setidaknya dua negara yang secara *de facto* telah menjajah, yakni bangsa Belanda dan Jepang. Pemerintahan Belanda mempersempit pergerakan politik umat Islam, karena ketakutannya terhadap gerakan Pan-Islamisme yang telah menghancurkan tujuan mereka tentang hubungan politik dan Islam di Indonesia (Katimin, 2017). Sedangkan kebebasan berpolitik umat Islam di Indonesia terjadi saat pemerintahan Jepang, terbukti dengan dorongan dan prioritas Jepang dalam mendirikan organisasi-organisasi Islam (Noer, 1987).

Pada awal kemerdekaan, partisipasi politik Islam di Indonesia semakin memanas dan tercipta persaingan dengan memunculkan berbagai ideologi (Jailani, 2015). Pembahasan terkait ideologi menjadi salah satu dorongan politisi Indonesia dan kelompok Islam yang telah lama terjaring dari masa kolonial Belanda dan Jepang untuk membentuk partai yang berasaskan Islam. Melihat keberadaan umat Islam yang mayoritas di negara Indonesia menjadi bukti kuat dalam perjalanan partai politik Islam di Indonesia (Ricklefs, 2009). Partai Islam di awal kemerdekaan yang didirikan di

Indonesia adalah Partai Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi). Pendirian partai Masyumi berlangsung di Yogyakarta, pada tanggal 7 sampai 8 November 1945. Menyusul memorandum dari Wakil Presiden nomor X pada 3 November 1945, yang memuat tentang pendirian partai politik (Samsuri, 2004). Lahirnya Masyumi terjadi ketika bangsa Indonesia dalam masa transisi dari era penjajahan menuju independensi, di mana kehidupan bernegara belum sepenuhnya normal dan stabil. Kehadiran partai Masyumi diharapkan mampu menjadi tonggak awal penyatuan umat Islam di masa awal kemerdekaan dan semacam upaya umat Islam untuk mengorganisir kekuatan dan kiprahnya mengaplikasikan ajaran syari'ah di bidang politik (Noer, 1987). Namun, berbagai komponen di bawah naungan Masyumi kembali terpecah. Umat Islam terbagi menjadi beberapa partai baik dari kepentingan kelompok sendiri maupun ingin berkoalisi dengan partai lain. Pada akhirnya, Masyumi membubarkan diri sebagai partai politik Islam terlepas adanya Keputusan Presiden Soekarno tahun 1960 tentang pelarangan Masyumi.

Jika fenomena politik Islam periode awal kemerdekaan atau masa pemerintahan Orde Lama ada Masyumi, maka berbeda halnya dengan periode Reformasi terdapat partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Andrias, Kusmayadi, & Agung, 2017). Partai PKB merupakan partai yang tergolong unik dari segi ideologi. Secara kelembagaan PKB mencantumkan Pancasila sebagai asas partai, namun bertolak belakang dari hal tersebut kelahiran PKB diprakarsai oleh organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) (Dhakhiri & Djafar, 2015). Pendirian PKB berlangsung di Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998 yang diprakarsai oleh para ulama Nahdlatul Ulama, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, A. Muhit Muzadi, dan A. Mustofa Bisri. Berdirinya PKB tidak terlepas dari dinamika politik setelah lengsernya Presiden Soeharto (Hamad, 2004). Kehadiran PKB sebagai bentuk keinginan politik para ulama NU melihat kondisi negara yang masih prihatin dan belum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, sekaligus sebagai tempat penggerak demokrasi atau aspirasi rakyat Indonesia terutama warga NU (Amir, 2003).

Partai PKB dalam perjalanan politiknya menyatakan sebagai partai yang bersifat terbuka, demokratis dan kebangsaan. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada perbedaan, baik itu dalam urusan agama, suku, ras maupun golongan. Tujuan dari partai PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui sistem pemerintahan yang menanggung terciptanya aturan kehidupan bernegara yang merata dan memiliki sistem pemerintahan yang amanah atau dapat dipercaya, serta menjamin hak-hak asasi manusia bagi pengembangan derajat bangsa Indonesia yang direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa (*Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, 2006)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat perjuangan partai Masyumi dan partai PKB dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia terutama umat Islam dalam kancah politik di Indonesia. Kedua partai Islam ini memiliki perbedaan dari segi ideologi dan asasnya. Masyumi lebih mengedepankan visi dan misi partai dalam mendirikan negara Islam, sedangkan PKB sebagai partai Islam yang baru lahir di masa Reformasi bersifat lebih terbuka dan merupakan salah satu partai nasionalis yang berasaskan Pancasila walaupun di sisi lainnya ada kekuatan Islam yang melatarbelakangi lahirnya partai ini. Dengan begitu, artikel ini sangat perlu dibahas untuk melengkapi dan menambah khazanah baru publikasi terkait pembahasan tentang Islam politik yang berkembang di Indonesia melalui partai Masyumi dan partai PKB.

METODE

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan historis. Metode ini merupakan proses penafsiran sebagai sebuah narasi dari konstruksi sosial dan penafsiran atau pembahasan yang terstruktur dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah secara baik (Abdurrahman, 1999). Adapun penelitian sejarah Kuntowijoyo membagi empat tahapan kerja, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber baik itu dari eksternal maupun internal, penafsiran

dari sumber yang ditemukan, dan penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, [2013](#)). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dikaji. Setelah itu dilakukan interpretasi berdasarkan realitas di lapangan terhadap objek sasaran dari penelitian dan kemudian hasil penelitian akan ditulis dalam bentuk deskripsi atau narasi. Oleh karena itu, fokus utama artikel ini ialah mendeskripsikan perjuangan Islam politik di Indonesia melalui partai Masyumi (masa Orde Lama) dan Partai Kebangkitan Bangsa (masa Reformasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Politik Islam di Indonesia

Bicara terkait hubungan politik dan Islam sampai sekarang telah menjadi topik pembicaraan yang masih hangat untuk dipahami ketika berkecimpung dalam suatu politik Islam. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang menjadi polemik sampai sekarang seperti apakah sistem politik dan ketatanegaraan sudah secara jelas diatur di dalam Islam. Pertanyaan ini tidak pernah habis dan banyak pihak yang memperdebatkannya. Pemahaman terkait masalah hubungan Islam dan negara dibagi menjadi tiga model, antara lain; (1) Model yang menyatakan bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan; (2) Islam dan negara yang saling terikat dan bersinggungan, serta; (3) Islam dan negara tidak berkaitan dengan sistem pemerintahan atau sekuler. Menurut Muhammad Asad, sebuah negara baru bisa dikatakan benar-benar Islami harus memiliki jiwa kesadaran tinggi dalam melaksanakan ajaran Islam secara benar terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, dengan begitu ajaran tersebut bisa disatukan ke dalam Undang-Undang Negara (Rais, [1991](#)). Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, yang menyatakan bahwa organisasi politik merupakan suatu nilai dalam kehidupan kelompok manusia, dan hal tersebut merupakan kebutuhan agama yang penting. Tanpa tanggungannya, agama tidak akan bisa eksis (Jan, [2017](#)).

Melihat pandangan para ahli di atas, maka model yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara di Indonesia lebih cenderung berkembang antara pemikiran formal dan substantivis. Istilah pendekatan formal sendiri lebih cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Maksud dari pendekatan tersebut memperkenalkan konsep negara ke dalam simbolisme agama atau model negara ataupun partai Islam. Sedangkan istilah pendekatan substantivis lebih menekankan isi daripada bentuk. Dengan kata lain lebih memperhatikan kandungan agama dalam proses politik (Effendi, [2003](#)).

Proses mewujudkan cita-cita tersebut membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Inilah yang dilakukan umat Islam Indonesia. Karena dipahami bahwa melawan segala bentuk kezaliman adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Muslim percaya prinsip ini benar. Sehingga jika tidak dilaksanakan atau tercapai, tidak mungkin dapat melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Oleh karena itu, wajar jika dikatakan bahwa umat Islam Indonesia dikenal sebagai penentang keras segala bentuk imperialisme. Tokoh-tokoh muslim yang tergabung ke beberapa partai menginginkan suasana kebangsaan melalui syariat Islam. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan sehingga perjuangan untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat tentu tidak akan ada habisnya. Sebagai bangsa yang multi-nilai, tidak hanya terwujud dalam suku dan adat istiadat namun yang lebih buruk lagi, perbedaan keyakinan dan agama tentu menimbulkan keinginan yang berbeda pula untuk mewarnai bangsa dan negara tersebut. Akibat yang tak terhindarkan adalah timbul perselisihan antar bangsa karena perbedaan keyakinan. Bagi umat Islam, negara yang ingin mereka bangun didasarkan pada ajaran Islam, yang memasukkan ajaran tersebut ke dalam Undang-Undang negara. Inilah tema sentral yang diusung oleh para tokoh Islam Indonesia, yang pertama sebelum deklarasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan (Mahanani, [2020](#)).

Ketika Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, berakhirnya masa penjajahan menuntut pemerintah untuk menata diri dan memberikan wajah baru pada negara ini. Masalah yang amat mendasar adalah pembentukan dasar negara. Diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui para pemimpinnya, Islam berusaha membenahi jati dirinya dengan mengedepankan penyucian nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara. Dari perjuangan keras kepala panitia beranggotakan sembilan orang yang dipimpin oleh Soekarno, lahirlah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Masalah ini memuncak dalam perdebatan dalam hasil pemilihan umum pertama (1955) dari Rancangan Konstitusi. Hal ini tentunya dapat dilihat sebagai contoh realitas sejarah bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, yang membentuk perkembangan politik Islam yang terus berlanjut dalam sejarah politik Indonesia hingga saat ini.

Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama

Masyumi identik dengan simbol politik Islam di Indonesia ketika masa pemerintahan Orde Lama. Islam dimaknai sebagai Islam yang bersatu, atau Islam yang selalu menganggap penting simbol-simbol. Sekelompok umat Islam yang tergabung dalam Partai Masyumi merupakan kelompok yang menginginkan penyatuan ajaran Islam, khususnya dalam konteks negara. Oleh karena itu, sebagai simbol adanya aturan yang mengandung hukum Islam yang bersatu, menjadikannya mimpi dan harapan bagi mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi negara (Mahmuddin, 2015). Tujuan dari konsep semacam itu adalah untuk mendirikan Masyumi sebagai alat juang umat Islam. Masyumi lahir dari adanya perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda yang berbentuk non-fisik dan melahirkan bentuk tindakan politik. Kegiatan ini ditandai dengan munculnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Islam modernis dan Islam tradisional. Beberapa tokoh politik yang terlibat dalam gerakan sosial keagamaan, seperti Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Mawardi, Muhammad Natsir, Soekiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusuma, Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Abu Hanifah (Mahendra, 1999).

Islam politik di Indonesia diwakili oleh Masyumi di pramusim. Masyumi adalah partai Islam pasca-kemerdekaan terbesar yang didirikan pada akhir 1943. Pihak Jepang mendirikan Masyumi untuk menampung perkumpulan dan memberikan status hukum militer terhadap tokoh-tokoh Islam, dengan tujuan mempersatukan seluruh umat Islam Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam melawan kolonialisme-imperialisme di Indonesia (Hasnu & Syam, 2021). Pada perkembangannya, Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7 November 1945, berdasarkan keputusan Kongres Rakyat Islam di Yogyakarta, dan dinobatkan sebagai satu-satunya partai politik Islam. Selama masa jabatannya, Masyumi memiliki pengurus, antara lain: Pada tahun 1945-1952, Sukiman Wirjosandjono menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz sedangkan Hasyim Asy'ari adalah Ketua Umum Dewan Syuro; Tahun 1952-1959, Muhammad Natsir menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz; dan Tahun terakhir 1959-1960, Prawoto Mangkusasmito yang menduduki Ketua Umum Dewan Tanfidz (Hanafie, 2011)

Masyumi diresmikan oleh Presiden Soekarno tetapi saat itu diwakilkan oleh Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso, sedangkan sambutan disampaikan oleh Sri Sultan HB IX. Pendirian partai didorong oleh beberapa alasan; Pertama, mempertahankan kedaulatan NKRI dan ideologi Islam. Kedua, implementasi hasrat Islam dalam urusan kenegaraan. Melihat alasan tersebut, menandakan bahwa pendirian partai Masyumi di pikiran para penggagasnya bukan semata-mata kelahiran sebuah eksistensi partai politik yang hanya berfokus dengan politik tertentu, melainkan lebih menegakkan eksistensi dari sebuah kewajiban agama Islam dalam tatanan kebangsaan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis. Hasrat Masyumi dalam membela Islam ditegaskan dalam cetusan politik tanggal 8 November 1945, yang menyatakan bahwa Masyumi didirikan sebagai respons langsung terhadap revolusi Indonesia yang sedang bergejolak, yaitu tekad kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Pasalnya, tindakan Belanda dan kelompoknya membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menyebabkan

proses pelaksanaan ajaran Islam terganggu (Kedaulatan Rakyat, 1945). Seperti yang dijelaskan Madinier yang dikutip oleh Gili Argenti, bahwa hasil Kongres Umat Islam di Yogyakarta tidak hanya mendeklarasikan pendirian partai politik Islam semata, melainkan juga mencantumkan dua resolusi dengan maksud kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Kedua resolusi tersebut berisi: (1) memperkuat persiapan umat Islam untuk melakukan jihad; (2) memperkuat barisan pertahanan negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan dalam ajaran Islam (Argenti, [2020](#)).

Perjuangan Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara menjadi sangat jelas di Konstituante, sebagaimana visi dan misi Masyumi adalah menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan sengit antara kubu Masyumi dengan lawan politiknya di parlemen. Mereka melakukan yang terbaik dan berjuang meskipun di akhir mengalami kekalahan, dan mereka harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada saat yang sama, Masyumi tidak terlepas dari tugas membantu umat Islam, karena umat Islam saat itu memandang Masyumi sebagai wadah pengorganisasian aspirasi politik umat Islam (Effendy, [1998](#)). Mengingat banyak komentar yang dilontarkan oleh kelompok Islam tentang perubahan yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta tercatat pada 18 Agustus 1945. Melihat posisi Indonesia saat itu dalam bahaya di mana mitra penjajah telah mengepung dan pihak Belanda menginginkan kembali ke Indonesia untuk menjajah, sementara tentara Jepang masih sepenuhnya menguasai Indonesia (Katimin, [2017](#)).

Masyumi adalah partai politik yang berunsur Islam. Para anggotanya berkumpul untuk mengkomunikasikan dan menyatukan tekad dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia dalam satu wadah partai politik. Uniknyanya dari Masyumi dibandingkan dengan partai-partai lainnya, partai ini memiliki dua keanggotaan. Keanggotaan pertama mencakup perorangan dan keanggotaan kedua mencakup organisasi. Pada tahap awal berdirinya, terdapat empat organisasi yang bergabung, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PSSI dan Persatuan Islam (Persis) (Argenti, [2020](#)). Dalam kelanjutannya, sebagian ormas Islam kecuali Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) menjadi bagian dari Masyumi. Butuh waktu setahun setelah berdirinya, Masyumi mampu mengambil alih posisi PNI menjadi partai terbesar di Indonesia saat itu. Secara umum, umat Islam sepakat untuk tetap bersatu dan mengakui hanya satu partai Islam, yaitu Masyumi, yang memperjuangkan aspirasi mereka dalam bernegara (Kahin, [1980](#)).

Masuknya Masyumi ke dunia pemerintahan tidak berjalan semulus yang diharapkan, hal ini disebabkan berbagai pergolakan baik di kelompok sendiri maupun kelompok lainnya, sebab kondisi politik di Indonesia saat itu masih memerlukan konfrontasi secara serius. Selain itu, sangat sensitif bagi pemeluk agama selain Islam untuk melihat tujuan partai ini, bahkan partai ini langsung berhadapan dengan partai lain dengan pandangan dan tujuan yang berbeda dan kontradiktif. Perbedaan pendapat terkait ideologis antara kalangan Islam politik dengan kelompok nasionalis sekuler sebenarnya telah terjadi cukup lama, bahkan Indonesia belum merdeka, mereka sudah berselisih dalam urusan agama dengan negara. Kelompok Islam yang tergabung dalam Masyumi mempunyai prinsip bahwa agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dengan urusan politik (negara), kalangan ini memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat pada pemahaman negara dan masyarakat yang diatur dalam Islam sebagai agama, yang diartikan luas tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan manusia dengan dunia. Sementara itu, kelompok nasionalis sekuler mempunyai prinsip kehidupan politik harus ada pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Kelompok ini beranggapan agama hanya ajaran-ajaran yang menyangkut masalah akhirat dan urusan pribadi, sedangkan politik merupakan masalah duniawi serta menyangkut kepentingan banyak orang (Suhelmi, [2012](#)). Hal inilah yang menimbulkan argumentasi sengit yang terjadi di ruang Mahkamah Konstitusi terkait Jakarta Charter (Piagam) dan Dasar Negara, serta adanya pemberontakan di wilayah Indonesia. Pemberontakan tersebut berupa gejolak sosial politik yang berhasil menyiksa pemerintahan, antara lain pemberontakan Darul Islam (DI/TII), Perjuangan Semesta Alam (Permesta), dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (Gunawan, [2000](#)).

Sejak Muhammad Natsir terpilih sebagai Ketua Umum Masyumi (1952), partai mengemukakan keras tindakan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menumpas pemberontakan DI/TII. Sikap kritis yang dilontarkan Natsir ternyata mendapat dukungan penuh dari anggotanya. Dalam hal ini, Natsir menghendaki penyelesaian konflik daerah dilakukan melalui dialog dengan para pemberontak, dengan alasan di antaranya; (1) Islam memiliki kewajiban untuk mendamaikan sesama muslim yang berselisih; (2) Masyumi dan DI/TII memiliki misi yang sama untuk mendirikan negara Islam berbentuk Republik; dan (3) Masyumi memiliki keinginan yang terselubung untuk merangkul para pendukung Darul Islam Aceh untuk memilih Masyumi pada pemilu 1955. Akan tetapi, usulan dari Masyumi ini mendapat kecaman dari lawan-lawan politiknya terutama PKI dan PNI. Mereka juga dengan tegas menolak negosiasi dari sudut pandang militer. Akibatnya Masyumi dituduh ikut serta dalam pemberontakan Darul Islam, dan tuduhan yang diperkuat oleh PKI dan PNI (Gunawan, [2000](#)).

Adanya tuduhan tersebut, Masyumi dianggap gagal dalam memperjuangkan “Negara Republik yang berlandaskan Islam”. Hal ini membentuk kekecewaan dari kelompok fanatik Islam. Lebih jelasnya, ideologi negara tidak lagi berlandaskan unsur keislaman setelah dihilangkannya Tujuh kata dalam Jakarta Charter (Piagam Jakarta) yang sudah disepakati secara kompromi. Selain itu, Soekarno sebagai Presiden juga mengeluarkan Dekrit untuk menyikapi pemulihan UUD 1945 dan pembubaran Konstituante, serta menetapkan Demokrasi Terpimpin dari sistem Parlementer sebagai era baru politik Indonesia (Ma’afi, [2013](#)). Kritikan keras muncul kembali dari partai-partai Islam. Mereka menyatakan bahwa keputusan ini merupakan sistem pemerintahan anti-demokrasi yang akan berdampak membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia (Amir, [2003](#)). Pada akhirnya, Soekarno kembali mengeluarkan Kepres/200/1960, tercatat pada tanggal 17 Agustus 1960, yang berisi mengenai larangan bergeraknya eksistensi Partai Masyumi dan PSI di kancah perpolitikan Indonesia (Bathoro, [2018](#)). Tidak hanya itu, Masyumi juga dituduh ikut serta dalam pemberontakan PRRI tahun 1958. Bahkan, Masyumi menerima ancaman dari pemerintah sehingga pada tanggal 13 September 1968, Masyumi menyatakan mengundurkan diri dari dunia politik. Menindaklanjuti pembubaran partai Masyumi, ada beberapa partai Islam yang masih aktif dalam kancah politik di Indonesia, yakni NU, PSII dan Perti. Ketiga partai ini tidak ikut serta dibubarkan melainkan mereka bergabung dan bekerja sama dengan Soekarno ketika demokrasi terpimpin yang tergabung dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Ideologi Partai Kebangkitan Bangsa Masa Reformasi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan di rumah Kiai H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998. Awal pembentukan partai bermula lengsernya masa jabatan Presiden Soeharto di Orde Baru yang akhirnya melahirkan masa Reformasi (Rohman, [2015](#)). Pada masa Orde Baru masyarakat tidak memiliki kebebasan dan merasa haknya dirampas oleh pemerintahan, mulai dari hak berpendapat, memilih, dan menjamin keselamatan. Masyarakat menginginkan adanya kebebasan dan kebahagiaan, baik itu dibidang politik, agama, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Tidak lama Soeharto jatuh, Nahdlatul Ulama (NU) banyak menerima usulan masyarakat agar NU bergabung atau membentuk partai untuk menampung keinginan masyarakat, khususnya masyarakat NU itu sendiri (Fadli, [2018](#)).

Nahdlatul Ulama (NU) menyanggupi permintaan dari masyarakat, terbukti hasil pertemuan NU ke-27 di Situbondo, yang menyatakan bahwa organisasi NU tidak berhubungan dengan partai lain dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oleh sebab itu, NU membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar masyarakat dapat memberikan aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dengan mudah. PKB diharapkan mampu bersama seluruh komponen masyarakat lainnya untuk membangun bangsa dan masyarakat Indonesia dalam menggapai harkat bangsa (Shobacha, [2012](#)).

PKB adalah partai yang didukung oleh kelompok elite ormas NU dan seluruh lapisan masyarakat NU dalam menyikapi timbulnya era Reformasi. Dalam kiprahnya, PKB mengklaim sebagai partai yang terbuka dan inklusif. Sebab sistem politik yang diambil oleh PKB berasaskan Pancasila, walaupun secara tidak langsung partai tersebut di bentuk oleh kelompok keagamaan NU. PKB memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk pemerintahan yang harus dipertahankan dan Pancasila harus diterima sebagai dasar dan ideologi partai atau negara. Alasan diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi partai tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Perannya dalam menentukan struktur dan fungsi partai tidak dapat dipungkiri, mulai dari ide-ide segar dan hasil pemikirannya yang moderat hingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan ideologi partai PKB yang berwawasan kebangsaan, demokratis dan terbuka (Subagio & Sumarno, 2019).

Dalam pandangan Gus Dur, gagasan harus dipahami sebagai perangkat pemersatu bangsa dan pelaksana pedoman pemerintahan nasional. Pemahaman ini tidak perlu dilihat sebagai formula suci yang kebal terhadap kritik dan perubahan (Ariffin, 2019). Dalam konteks politik Indonesia, instrumen pemersatu adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa serta berperan penting dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan setiap keyakinan (agama) di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi “*rule of the game*” yang mempersatukan semua agama dan kepercayaan tersebut. Sikap negara yang monoreligius dan kecenderungan Pancasila melindungi kepentingan partai politik mengaburkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (Effendy, 1998). Dengan demikian, PKB menyatakan bahwa ideologi politik partai merupakan Pancasila. PKB menolak asumsi bahwa Islam diharapkan sebagai ideologi partai. Islam harus dijadikan pedoman untuk membela keadilan, kesejahteraan sosial, melawan diskriminasi, membela perilaku manusia dan memperjuangkan kesejahteraan umat manusia (Darajat, 2017). Hal ini selaras dengan cita-cita partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Di dalamnya tercakup terwujudnya bangsa yang adil dan makmur lahir dan batin, materiil dan spiritual, perwujudan kebangsaan, tatanan politik yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia. Pada pemilihan umum 2004, PKB menempati posisi tiga besar dengan 10,61% atau 12.002.885 suara, dipimpin oleh Partai Golkar dan PDI-P, merebut 52 kursi di DPR (Koirudin, 2005).

Turunnya perolehan suara akibat ada ketegangan antara fraksi Gus Dur dan Matori Abdul Jalil. Ketegangan bermula dari keinginan beberapa partai di parlemen untuk menduduki kursi kepresidenan Gus Dur yang akan digulingkan oleh lawan politiknya. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta anggota partainya (F-PKB DPR-RI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tidak menghadiri sidang istimewa tersebut. Namun, Matori Abdul Jalil dan ijtihadnya sendiri memilih untuk ikut serta dan kehadiran Matori dalam rapat khusus itu berujung pada pemecatannya dari PKB (Choirie, 2008). Seolah tak puas dengan konflik pertama, PKB kembali bentrok, kali ini terkait pencopotan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai presiden dan sekretaris jenderal DPP PKB, karena keduanya sama-sama menjabat menteri di kabinet koalisi Indonesia. Lukman Edi, Dirjen Dewan Tanfiz dan sebelumnya Sekjen, diberhentikan dari jabatannya. Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi tidak terima dengan pemecatan tersebut dan menggugat Gus Dur yang salah. Perpecahan kedua fraksi tersebut berujung pada lahirnya dua kongres, Dewan Luar Biasa Parung, yang memutuskan mengganti Yenny Wahid dari Muhaimin Iskandar sebagai Sekjen, Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Dewan Tanfidz (Hannan & Busahwi, 2021). Akibat konflik yang berkepanjangan, PKB turun drastis dalam pemilihan parlemen tahun 2009, hanya memperoleh 5.146.122 suara atau hanya 4,94%, dan memenangkan 27 anggota parlemen. Terakhir, pada 2014 meningkat tajam menjadi 9,04 persen atau 11.298.957 suara, dan meraih 47 anggota parlemen. Perolehan suara PKB yang signifikan terjadi karena penggabungan partai-partai setelah lama bersengketa PKB (Hanafie, 2011)

Pada tahun 2014, PKB mengalami kemajuan dan membuat partai ini kembali memperoleh suara yang signifikan di Pemilihan Umum. Peningkatan perolehan suara ini tidak lepas dari pengalaman yang pahit akibat adanya konflik internal yang berkepanjangan. Hal ini membuat partai terus-menerus melakukan perubahan dan belajar untuk berbenah diri, serta upaya untuk terus bertahan walaupun perolehan suara menurun. Tidak hanya itu, PKB juga melakukan perluasan rekrutmen politik yang dijadikan sebagai dimensi internal maupun eksternal. Kondisi inilah yang dijadikan cerminan oleh PKB untuk membangun institusi yang sehat tanpa adanya konflik (Hamad, 2004).

SIMPULAN

Sistem politik Islam di Indonesia merupakan aturan yang dapat berubah kapan pun waktunya. Namun, di dalam sistem ini terdapat bagian-bagian tertentu yang diatur secara tegas karena berlaku umum. Jadi pelajaran yang cocok untuk semua aspek kehidupan bisa ditemukan dalam Islam. Adanya sentuhan Islam dalam dunia politik menyebabkan kelompok masyarakat Islam tradisional maupun masyarakat Islam moderat ingin membentuk partai yang berasaskan Islam. Hadirnya Masyumi sebagai bentuk tonggak pemersatu umat Islam di masa Orde Lama dan semacam upaya umat Islam untuk mengorganisir kekuatan dan kiprahnya dalam menerapkan ajaran syari'ah di bidang politik. Masyumi memiliki tujuan yang sangat sensitif bagi pemeluk agama selain Islam, bahkan partai ini berhadapan langsung dengan partai lain yang memiliki tujuan berbeda dan kontradiktif yaitu mendirikan ideologi negara berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya dengan Masyumi, PKB yang merupakan partai baru masa Reformasi bersikap lebih terbuka terkait masalah negara. Meskipun PKB dibidani oleh kelompok ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), namun PKB secara tidak langsung mengakui dan mengasaskan Pancasila sebagai ideologi negara.

REFERENSI

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amir, Z. A. (2003). *Peta Islam Politik: Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Andrias, M. A., Kusmayadi, E., & Agung, S. (2017). Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 21–33. <https://doi.org/10.14710/POLITIKA.7.2.2016.21-33>
- Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 37–57. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731>
- Ariffin, M. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.30870/CANDRASANGKALA.V5I1.6084>
- Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 24–41. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/757>
- Choirie, E. (2008). *Islam-nasionalisme Ummu-PKB studi komparasi dan diplomasi*. Jakarta: Pensil-324.
- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>
- Dhakhiri, H., & Djafar, T. M. (2015). Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa. *POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(1). Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/120>
- Effendi, M. R. (2003). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, dan Pasca Orde Baru). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(1), 89–105. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i1.93>
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fadli, Y. (2018). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.31000/jgcs.viii.267>
- Gunawan, H. (2000). *M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958*. Jakarta: Media Dakwah.

- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hanafie, H. (2011). *Buku Politik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hannan, A., & Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 49–69. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>
- Hasnu, & Syam, F. (2021). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. *Syntax Idea*, 1(2).
- Jailani, I. A. (2015). Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim dan Nasionalis pada saat Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 246–252. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.531>
- Jan, W. S. W. (2017). *Evolusi Islamisme dalam Politik Malaysia: Pecahnya Partai Islam Malaysia dan Penyebaran Gagasan Progresif*. Singapore: ISEAS-Yusof Institute.
- Kahin, G. McT. (1980). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Katimin. (2017). *Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Koirudin. (2005). *Menuju Partai Advokasi*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'afi, R. H. (2013). Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1), 77–95. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.77-95>
- Mahanani, Q. F. I. (2020). Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24042/JHCC.V1i2.6517>
- Mahendra, Y. I. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina.
- Mahmuddin. (2015). Formalisme Agama dalam Perspektif Gerakan Sosial: Prospek dan Tantangan di Masa Depan. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/JDI.V3i1.194>
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press.
- Prihatin, N. A. (2016). Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera). *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769>
- Putra, N. (2019). Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.30596/INTERAKSI.V3i1.2690>
- Rais, M. A. (1991). *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Ricklefs, M. C. (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (terj. Tim Serambi, Ed.). Jakarta: Serambi.
- Rohman, A. Z. F. (2015). Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004. *Jurnal Transformative*, 1(1), 21–33. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Samsuri. (2004). *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal* (Suyanto, Ed.). Yogyakarta: Safiria Indonesia Press.
- Shobacha, N. (2012). Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2(1), 99–113. Retrieved from <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1032>
- Subagio, M. E., & Sumarno. (2019). Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/28719>
- Suhelmi, A. (2012). *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. (2006). Bandung: Nuansa Aulia.